

**MALAPRAKTIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
LEGISLATIF TAHUN 2019**

**(Studi Tentang Kemelut Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu  
untuk PDI Perjuangan Dapil Kalimantan Barat 1)**



**TESIS**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Ilmu Politik pada Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

**HENGKI HAYATULLAH**  
**NIM. 14010120420053**

**PROGRAM MAGISTER ILMU POLITIK**  
**DEPARTEMEN POLITIK DAN ILMU PEMERINTAHAN**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**  
**SEMARANG**

**2022**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1 Nama lengkap : Hengki Hayatullah
- 2 Nomor Induk Mahasiswa : 14010120420053
- 3 Tempat/ Tanggal Lahir : Kendawangan, 28 Maret 1996
- 4 Jurusan / Program Studi : Magister Ilmu Politik
- 5 Alamat rumah : Jl. Perdana, Komplek Bali Agung 2 No. D 12  
Pontianak, Kalimantan Barat.

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang saya susun dengan judul:

### **MALAPRAKTIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019**

(Studi Tentang Kemelut Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu  
untuk PDI Perjuangan Dapil Kalimantan Barat 1)

Adalah benar-benar hasil karya sendiri bukan merupakan plagiat dari tesis atau karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar pascasarjana). Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Semarang, 28 November 2022

Yang membuat pernyataan

Hengki Hayatullah

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Tesis : MALAPRAKTIK DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019:  
Studi Tentang Kemelut Perolehan Suara dan Penetapan Hasil  
Pemilu untuk PDI Perjuangan Dapil Kalimantan Barat 1  
Nama Penyusun : Hengki Hayatullah  
NIM : 14010120420053  
Departemen : Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Diponegoro.

Diajukan sebagai syarat dalam menyelesaikan pendidikan Strata II Prodi Ilmu Politik

Dekan

Wakil Dekan I

Dr. Drs. Hardi Warsono, M.T  
NIP. 19640827 199001 1 001

Dr.Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin  
NIP. 19690822 199403 1 003

Dosen Pembimbing Tesis:

1. Dr. Nur Hidayat Sardini, Sos., M.Si  
NIP. 196910101997031001 (.....)
2. Dr. Dewi Erowati, S.Sos., M.Si  
NIP. 197501012003122001 (.....)

Dosen Penguji Tesis:

1. Dr. Laila Kholid Alfirdaus, S.IP., M.PP  
(.....)
2. Dr. Sos. Dra. Fitriyah, M.S.  
(.....)
3. Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin  
(.....)

**MOTTO**

**“ ORANG YANG TIDAK PERNAH BERMIMPI DIA TIDAK AKAN PERNAH  
MELIHAT MIMPI MENJADI KENYATAAN ”**

**“ YAKIN USAHA SAMPAI ”**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur kehadiran Allah SWT dengan kemurahan dan ridho-Nya, Tesis ini dapat ditulis sampai selesai dengan baik dan lancar. Dengan ini akan aku persembahkan Tesis ini kepada kedua orang tuaku tercinta. Kepada Komisioner KPU RI 2017-2022 kanda Viryan Azis (Almarhum) yang membuatku terinspirasi serta tertarik untuk melanjutkan studi Magister Ilmu Politik Konsentrasi Tata Kelola Pemilu.

## ABSTRAK

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019, PDI Perjuangan Dapil Kalimantan Barat 1 berhak atas dua kursi dari delapan kursi DPR. Adapun urutan perolehan suara tertinggi secara berturut-turut pertama, Cornelis memperoleh 285.797 suara, kedua, Alexius Akim memperoleh 38.750 suara, ketiga, Michael Jeno memperoleh 36.243 suara, keempat, Maria Lestari memperoleh 33.006 suara. Namun demikian, adanya malapraktik yang merugikan dimana terjadi pemecatan dan pengunduran diri calon anggota legislatif DPR RI terpilih sebelum ditetapkan sehingga mengubah konfigurasi pengisian legislator.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis malapraktik yang terjadi dalam perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu untuk PDI Perjuangan Dapil Kalbar 1. Analisis menggunakan teori malapraktik Pemilu oleh Sarah Birch dalam bukunya *electoral malpractice* (2011). Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif analitis melalui pendekatan studi kasus, yakni sebuah kasus instrumental tunggal. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam dan studi dokumen. Teknik analisis data menggunakan model Creswell melalui tahap mengolah data, membaca, mengcoding, menerapkan coding, deskripsi dan membuat interpretasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi malapraktik Pemilu yang berpengaruh pada penetapan calon terpilih DPR RI untuk PDI Perjuangan Dapil Kalbar 1, berupa manipulasi kerangka hukum Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Pemilu oleh partai politik, dilakukan dengan cara menggunakan celah dalam Pasal 426 Undang-Undang No. 7/2017 tentang Pemilu, apabila calon terpilih yang bersangkutan, meninggal dunia, mengundurkan diri, dan tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPRD sebelum ditetapkan oleh KPU. Alexius Akim selaku calon terpilih dipecat dan Michael Jeno dipaksa mengundurkan diri tanpa alasan yang jelas. Sedangkan manipulasi administrasi, terjadi dalam bentuk maladministrasi ajudikasi sengketa Pemilu oleh Bawaslu Kalbar. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya malapraktik Pemilu yaitu faktor umum; penyelenggara *ad hoc* memihak/tidak netral, hasil tindak lanjut putusan Bawaslu tidak digunakan, dan faktor khusus; adanya konflik internal partai.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah penetapan hasil Pemilu harus berdasarkan pada sistem Pemilu proporsional terbuka (*open list representation*) yakni harus kukuh mempertahankan calon anggota legislatif terpilih yang telah dipilih oleh masyarakat (pemilih) berdasarkan pada hasil perolehan suara terbanyak dari perolehan suara masing-masing calon. Saran yang dapat diberikan dalam tulisan ini, ialah perlunya melakukan revisi Undang-Undang No 7/2017 tentang Pemilu, Pasal 426 yang berkaitan dengan penggantian calon terpilih, agar mekanisme pemberhentian calon legislatif terpilih oleh partai politik, diatur di dalam Undang-Undang Pemilu, tujuannya agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Kata Kunci: Malapraktik, Pemilu, Penetapan Calon Terpilih.

## ***ABSTRACT***

In holding the 2019 Legislative Elections, the PDI Perjuangan Dapil West Kalimantan 1 is entitled to two seats out of the eight seats in the DPR. As for the order of the highest consecutive votes, first, Cornelis received 285,797 votes, second, Alexius Akim received 38,750 votes, third, Michael Jeno received 36,243 votes, fourth, Maria Lestari received 33,006 votes. However, there was an adverse malpractice in which there were dismissals and resignations of the elected DPR RI legislative candidates before they were determined, thus changing the configuration of the filling of legislators.

This study aims to analyze the malpractice that occurred in the acquisition of votes and the determination of election results for the PDI Perjuangan Dapil of West Kalimantan 1. The analysis uses the theory of election malpractice by Sarah Birch in her book electoral malpractice (2011). The research method uses a qualitative descriptive analysis through a case study approach, namely a single instrumental case. Data collection uses in-depth interviews and document study techniques. The data analysis technique uses the Creswell model through the stages of processing data, reading, coding, applying coding, describing and making interpretations.

The results of this study indicate that election malpractice occurred which affected the determination of the elected DPR RI candidate for the PDI Perjuangan Dapil of West Kalimantan 1, in the form of manipulation of the legal framework of the laws and regulations governing elections by political parties, carried out by using loopholes in Article 426 of Law No. 7/2017 concerning Elections, if the elected candidate in question dies, resigns, and no longer fulfills the requirements to become a member of the DPR, DPRD before being determined by the KPU. Alexius Akim as the elected candidate was fired and Michael Jeno was forced to resign for no apparent reason. Meanwhile, administrative manipulation occurred in the form of maladministration adjudication of election disputes by the West Kalimantan Bawaslu. The factors that influence the occurrence of election malpractice are general factors; ad hoc organizers take sides/not neutral, the follow-up results of Bawaslu decisions are not used, and special factors; There is an internal party conflict.

The conclusion of this study is that the determination of election results must be based on an open proportional election system (open list representation), that is, it must be persistent in defending the elected legislative candidates who have been elected by the public (voters) based on the results of the most votes obtained from the votes acquired by each candidate. The advice that can be given in this paper is the need to revise Law No. 7/2017 concerning Elections, Article 426 relating to the replacement of elected candidates, so that the mechanism for dismissing elected legislative candidates by political parties is regulated in the Election Law, the aim so that no one is harmed.

Keywords: Malpractice, Election, Determination of Elected Candidates.

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, puji syukur dan terima kasih yang tak terhingga saya panjatkan kehadirat kepada Allah SWT yang telah memberikan berkah dan rahmat-NYA kepada kita semua, serta Sholawat dan salam dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Aaihi Wasallam yang menjadi suri tauladan kita sepanjang zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul **MALAPRAKTIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019: Studi Tentang Kemelut Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu untuk PDI Perjuangan Dapil Kalimantan Barat 1.**

Tulisan ini disusun sebagai syarat dalam pemenuhan dan penyelesaian studi Magister (S2), Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro. Peneliti menyadari bahwa dari segi penyusunan maupun materi bahasan, karya tulis ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu peneliti membuka hati untuk segala kritik dan saran yang membangun untuk meningkatkan kualitas penyusunan tesis ini.

Dalam kesempatan ini, penulis bermaksud untuk menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Nur Hidayat Sardini.Sos.,M.Si selaku Pembimbing pertama atas nasehat dan kesabaran dalam membimbing dalam penyelesaian tesis ini.
2. Ibu Dr. Dewi Erowati, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing kedua, atas petunjuk dan kesabaran dalam membimbing penulis dalam melengkapi penyelesaian tesis ini.



3. Ibu Dr. Laila Kholid Alfirdaus, S.IP., M.PP selaku penguji pertama yang telah memberikan masukan untuk perbaikan tesis ini.
4. Ibu Dr. S.Sos. Dra. Fitriyah, M.S selaku penguji kedua yang telah memberikan masukan untuk perbaikan tesis ini.
5. Bapak Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin selaku penguji ketiga yang telah memberikan masukan untuk perbaikan tesis ini.

Dengan segala kerendahan hati pula penulis menghaturkan rasa hormat dan terima kasih serta penghargaan yang setulus-tulusnya kepada jajaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik :

1. Dr. Drs. Hardi Warsono, M.T. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang.
2. Dr. Laila Kholid Alfirdaus, S.IP., M.PP. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Politik FISIP UNDIP yang memberikan masukan dan dorongan yang menyemangati penulis untuk dapat menyelesaikan tesis ini.
3. Semua Bapak dan Ibu dosen yang berada di lingkungan Jurusan Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
4. Kepada staf Magister Ilmu Politik secara khusus Mas Apri, dan Mas Sholeh yang telah membantu peneliti dalam segala urusan perkuliahan dan Tesis.

Tidak lupa pula peneliti ingin menghaturkan rasa hormat dan mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan studi ini, antara lain :

1. Bapak Ramdan, S.Pd.I., M.Pd, Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat Periode 2018-2023 selaku informan yang telah memberikan izin bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penelitian ini.
2. Bapak Faisal Riza, S.T., M.H., Komisioner Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Periode 2018-2023 selaku informan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penelitian ini.

Selain itu juga peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan motivasinya kepada:

1. Keluarga di rumah yang telah memberikan doa, dorongan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini.
2. Bapak Drs. M. Sabran Achyar, M.Si, Wakil Dekan III FISIP UNTAN yang telah memberikan dukungan untuk melanjutkan studi Magister Ilmu Politik.
3. Bapak Dr. Jumadi, M.Si, Dosen Politik FISIP UNTAN yang telah memberikan dukungan, nasehat-nasehat baik, semangat dan motivasi untuk melanjutkan studi Magister Ilmu Politik Konsentrasi Tata Kelola Pemilu di Universitas Diponegoro.

4. Bapak Aliman Nuryadin, S.Pd, Kepala Sekolah SMP 3 Kendawangan yang telah memberikan dukungan dan kepercayaan untuk melanjutkan studi Magister Politik Konsentrasi Tata Kelola Pemilu di Universitas Diponegoro.
5. Korps Alumni HMI (KAHMI) Provinsi Kalimantan Barat yang telah memberikan dukungan dan kepercayaan untuk melanjutkan studi Magister Politik Konsentrasi Tata Kelola Pemilu di Universitas Diponegoro.
6. Para Senior Bang Ahmad Saufi, M.AP dan Bang Muhammad Haris Zulkarnain, S.Sos, M.H yang telah memberikan masukan, saran dan nasehat baik saad menjadi mahasiswa Magister Politik Konsentrasi Tata Kelola Pemilu di Universitas Diponegoro.

Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa membalas budi baik serta melimpahkan karunia yang tak terhingga atas segala bantuan yang telah diberikan pada peneliti. Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Politik khususnya dalam ilmu Tata Kelola Pemilu, serta perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya.

Semarang, 28 November 2022

Penulis

Hengki Hayatullah  
NIM. 14010120420053

## DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Rumusan Masalah .....	13
1.3    Tujuan Penelitian.....	13
1.4    Manfaat Penelitian.....	14
1.5    Tinjauan Pustaka .....	14
1.5.1    Penelitian Terdahulu .....	15
1.6    Kerangka Teori.....	19
1.6.1    Electoral Malpractice .....	19
1.6.2    Electoral Fraud .....	21
1.6.3    Penyebab Kecurangan Pemilu.....	22
1.6.4    Jenis-Jenis Kecurangan Pemilu .....	23
1.6.5    Kategori dan Modus pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu .....	25
1.6.6    Konsekuensi Kecurangan Pemilu.....	29
1.6.7    Electoral Integrity.....	30

1.6.8	Integritas Penyelenggara Pemilu .....	32
1.6.9	Kerangka Pemikiran .....	34
1.6.10	Definisi Konseptual dan Operasional .....	37
1.7	Metode Penelitian .....	39
1.7.1	Jenis Penelitian .....	39
1.7.2	Lokasi dan Waktu Penelitian .....	40
1.7.3	Informan Penelitian .....	41
1.7.4	Sumber Data .....	42
1.7.5	Teknik Pengumpulan Data .....	43
1.7.6	Teknik Analisis Data .....	44
1.7.7	Kualitas Keabsahan Data .....	46
<b>BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN PEMILU TAHUN 2019</b>		
<b>PROVINSI KALIMANTAN BARAT .....</b>		
2.1	Profil Provinsi Kalimantan Barat .....	48
2.1.1	Kondisi Geografi .....	48
2.1.2	Kondisi Demografi .....	50
2.1.3	Kondisi Wilayah Administrasi .....	52
2.1.4	Kondisi Ekonomi .....	54
2.1.5	Kondisi Pendidikan .....	54
2.2	Pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kalimantan Barat .....	54
2.2.1	Daftar Pemilih Tetap dan Daerah Pemilihan .....	55
2.2.2	Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kalimantan Barat .....	56
2.3	Malapraktik penetapan calon terpilih .....	59
<b>BAB III MALAPRAKTIK PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL</b>		
<b>PEMILU UNTUK PDI PERJUANGAN DAPIL KALBAR 1 .....</b>		
3.1	Manipulasi Undang-Undang Pemilu ( <i>manipulation of election legal framework</i> ) .....	61
3.1.1	Analisis Manipulasi Undang-Undang Pemilu .....	73
3.2	Manipulasi Administrasi ( <i>manipulation of electoral administration</i> ) .....	75
3.2.1	Analisis Manipulasi Administrasi .....	84

3.3	Faktor -faktor penyebab terjadi malapraktik Pemilu.....	87
3.3.1	Faktor Umum .....	87
3.3.1.1	Penyelenggara <i>ad hoc</i> memihak/tidak netral .....	87
3.3.1.2	Hasil Tindak lanjut putusan Bawaslu tidak digunakan .....	94
3.3.2	Faktor Khusus .....	100
3.3.2.1	Konflik internal .....	100
3.4	Analisis Faktor -faktor penyebab terjadi malapraktik Pemilu.....	103
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>114</b>
4.1	Simpulan .....	114
4.2	Saran.....	116
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>117</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Beberapa Jenis Pelanggaran yang Dilakukan oleh Panitia Pemilihan pada Pemilu Tahun 2019.....	3
Tabel 1.2 Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.....	4
Tabel 1.3 Berkurang atau bertambahnya perolehan suara partai dan/atau caleg DPR RI PDIP dapil Kalbar 1 Pemilu Tahun 2019.....	11
Tabel 2.1 Luas Wilayah Kalimantan Barat menurut Kabupaten (Km2).....	53
Tabel 2.2 Hasil Pemilu 2019 untuk Kalimantan Barat.....	56
Tabel 2.3 Susunan anggota DPR RI terpilih dapil Kalimantan Barat 1 Pemilihan Umum tahun 2019.....	57
Tabel 2.4 Susunan anggota DPR RI terpilih dapil Kalimantan Barat 2 Pemilihan Umum Tahun 2019.....	57
Tabel 2.5 Hasil penghitungan perolehan suara caleg DPR RI dapil Kalbar 1 untuk PDI Perjuangan pada Pemilu Tahun 2019.....	59
Tabel 3.1 Putusan Bawaslu RI untuk Kabupaten Landak.....	82
Tabel 3.2 Hasil koreksi DAA1 berdasarkan C1 Plano suara PDI Perjuangan di 6 kecamatan di Kabupaten Landak.....	99
Tabel 3.3 Matriks Penelitian.....	110

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Berfikir Penelitian.....	36
Gambar 2.1 Peta Wilayah Provinsi Kalimantan Barat.....	49
Gambar 3.1 Alexius Akim menerima surat memimpin DPW PSI Kalbar.....	72
Gambar 3.2 Sejumlah bendera PDI Perjuangan dibakar.....	101





